



Parlementaria



3 Batasi Wewenang Polisi & TNI dalam RUU



4 DPR Terima LHP LKPP 2023 Dari BPK



DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan Rancangan UU Bahasa Daerah



DPR Setujui Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Jadi WNI

Nomor 1297/III/VI/2024 Juni 2024



9 772614 339005



UU KIA Resmi Disahkan

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA) menjadi Undang-Undang (UU). Dalam pembahasannya oleh Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah berlangsung dinamis. Terkadang ada perbedaan tajam atas rumusan suatu norma dalam RUU, namun perbedaan itu dapat diselesaikan dengan mencari titik temu berdasarkan prinsip saling menghormati.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat menanyakan dan meminta persetujuan kepada segenap Anggota Dewan. "Apakah RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat disahkab menjadi UU?" tanya puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (4/6). Seketika dijawab "Setuju," oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, fokus pengaturan RUU KIA adalah pengaturan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak



Ketua DPR RI menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yaitu kehidupan anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun.

"Perubahan fokus pengaturan

ini membawa konsekuensi Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi materi pengaturan dalam RUU ini. Agar rumusan norma dalam RUU tersebut sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan tidak terjadi pengulangan," kata Diah.

Ia menyampaikan Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah akhirnya menyepakati RUU KIA pada seribu hari pertama kehidupan pada tingkat I pada tanggal 25 maret 2024 untuk diproses lebih lanjut pada Pembahasa tingkat II dalam Rapat Paripurna. 9 fraksi di Komisi VIII menyetujui dengan 1 fraksi yaitu PKS memberikan catatan untuk melengkapi klausul menimbang ditambah pasal 28 B ayat I dan Pasal 34 UUD 1945. **tn/aha**





Biro Pemberitaan Parlemen

Batasi Wewenang Polisi & TNI dalam RUU

KOREKCU • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



FOTO: YGA/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan mekanisme pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri tetap berlanjut di DPR RI. Demi mencegah pelanggaran undang-undang, menurutnya poin-poin perluasan wewenang akan dimasukkan dalam RUU tersebut. Namun dia memastikan perluasan yang dimaksud tetap terbatas sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk mencegah pelanggaran Undang-Undang, kita masukkan di situ ada perluasan tapi terbatas, sesuai dengan kebutuhan yang kemudian akan ditentukan oleh Presiden,” kata Dasco usai Rapat

Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Dia menilai bahwa wewenang aparat negara tersebut justru dibatasi dalam dua RUU tersebut. Karena menurutnya ada beberapa kementerian dan lembaga yang sejauh ini telah diduduki oleh aparat negara itu belum diatur dalam undang-undang.

“Kalau dilihat dibaca di Undang-Undang TNI itu, itu juga perluasannya juga hanya terbatas. Nah kalau kita lihat dari beberapa kementerian lembaga yang boleh diduduki oleh TNI, itu sampai sekarang malah ada yang kemudian tidak termasuk di situ, tapi kemudian sudah memakai organ dari TNI misalnya di KKP,” terang Politisi Fraksi Gerindra ini. **we, hal/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danurtirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu
Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio,
Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti
Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie,
Balggys Maesyhnta, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geraldidi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P.,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Terima LHP LKPP 2023 Dari BPK

DPR RI secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (4/6) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta itu disampaikan pula oleh BPK Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat.



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 dari BPK RI di Rapat Paripurna, Selasa (4/6/2024).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK kepada DPR, DPD dan DPRD dilakukan sesuai ketentuan pada pasal 7 ayat 1 UU nomor 15

tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengatakan bahwa DPR bertugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2014.

“DPR mempunyai tugas membahas dan menginjak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK berkenaan dengan hal tersebut kami persilahkan kepada yang terhormat ketua BPK RI untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 serta penyerahan laporan hasil penyerahan semester 2 tahun 2023 dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 oleh BPK RI,” tuturnya. **uc/aha**



SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BER-SAMA BAHWA SESUAI KETENTUAN PASAL 17 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DISAMPAIKAN OLEH BPK KEPADA DPR DAN DPD SELAMBAT-LAMBATNYA 2 BULAN SETELAH MENERIMA LAPORAN KE-UANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

Puan Maharani

Ketua DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan Rancangan UU Bahasa Daerah

DPR RI menyetujui untuk tidak melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bahasa Daerah pada pembahasan tingkat I pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

“Kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Komisi X DPR RI terhadap kesepakatan untuk tidak melanjutkan pembahasan dalam tahap pembicaraan tingkat I atas rancangan undang-undang tentang bahasa daerah dapat disetujui?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani yang diikuti oleh seruan setuju oleh para anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih membacakan Laporan Komisi X DPR



FOTO: GER/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih terhadap pembahasan rancangan Undang-undang tentang bahasa daerah di Rapat Paripurna.

RI terhadap pembahasan rancangan Undang-undang tentang bahasa daerah. Dalam laporan tersebut disampaikan penarikan rancangan undang-undang tersebut karena menurut kajian dan kesepakatan Komisi X dan Pemerintah, regulasi

tentang bahasa daerah masih dirasa cukup memadai.

“Pemerintah juga menyadari bahwa saat ini sudah terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai bahasa daerah melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kesadaran tersebut juga dipahami oleh Komisi X DPR RI dan juga didukung oleh kajian dari Badan Keahlian Dewan,” urainya.

Dari hasil Komunikasi dan Kajian, lanjut Fikri, Pengaturan mengenai bahasa daerah sudah diatur dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. **gal/aha**



PEMERINTAH JUGA MENYADARI BAHWA SAAT INI SUDAH TERDAPAT BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR SECARA EKSPLISIT MENGENAI BAHASA DAERAH MELALUI UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN DAERAH BAIK TINGKAT PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA. KESADARAN TERSEBUT JUGA DIPAHAMI OLEH KOMISI X DPR RI DAN JUGA DIDUKUNG OLEH KAJIAN DARI BADAN KEAHLIAN DEWAN.

Abdul Fikri Faqih

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



DPR Setujui Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Jadi WNI

DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia pada dua atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Indonesia, yakni Calvin Verdonk dan Jens Raven. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan yang dilakukan Komisi III dan Komisi X DPR RI sebelumnya.

"Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Calvin Verdonk dan Jens Raven dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh Anggota DPR, yang diikuti persetujuan seluruh peserta Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Sebelumnya, Calvin Verdonk



Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

dan Jens Raven merupakan atlet sepak bola yang memegang kewarganegaraan Belanda. Persetujuan naturalisasi ini pun menandakan

langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, mengingat kedua pemain tersebut memiliki pengalaman dan keahlian yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam perkembangan sepak bola nasional.

Pemberian status WNI kepada Calvin Verdonk dan Jens Raven mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk para pecinta sepak bola di tanah air. Keputusan ini pun sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memajukan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional, dengan harapan besar bahwa kehadiran mereka akan membawa dampak positif bagi pencapaian tim nasional di berbagai kompetisi mendatang.

bia/aha



UU Kabupaten/Kota Diharapkan Mampu Perbaiki Regulasi Pembentukan Daerah

Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disahkan menjadi undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6).

Dengan disahkannya 27 UU Kabupaten/Kota, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan Komisi II berharap undang-undang tersebut dapat memperbaiki dan memperbaharui regulasi terkait pembentukan daerah.

"Sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini," kata Syamsurizal saat membacakan laporan Komisi II DPR RI tentang 27 RUU tentang Kabupaten/Kota, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Syamsurizal menambahkan, 27 UU Kabupaten/Kota ini dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyerahkan laporan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disetujuinya 27

UU Kabupaten/Kota juga diharapkan membuat setiap kabupaten/kota memiliki undang-undang pembentukannya sendiri. Hal ini, kata Syamsurizal, sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

Adapun, urgensi penyusunan 27 UU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Komisi II adalah sebagai bentuk penataan kembali dasar hukum pembentukan kabupaten/kota di Indonesia yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950 yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 bahwa semua Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan kepada UUD 1945.

bia/aha

SEHINGGA DAPAT MENGHINDARI KONFLIK HUKUM DAN ADMINISTRASI YANG MUNGKIN TIMBUL AKIBAT DASAR HUKUM YANG TIDAK LAGI RELEVAN DENGAN KONDISI SAAT INI.

Syamsurizal

Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapanya



Paripurna DPR RI Setujui Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

DPR RI menyepakati untuk menyetujui penunjukkan Destry Damayanti sebagai Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

“Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6’).

Uji kepatutan dan kelayakan serta persetujuan terhadap Destri Damayanti sebagai Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dalam pasal 9 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK) yang mengamankan



Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat foto bersama dengan Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Senior Bank Indonesia di Rapat Paripurna DPR RI.

**PIMPINAN DEWAN
MENGUCAPKAN SELAMAT
KEPADA CALON DEPUTI
GUBERNUR SENIOR BANK
INDONESIA. SEMOGA DAPAT
MENJALANKAN TUGAS DENGAN
TANGGUNG JAWAB DAN AMANAH.**

Puan Maharani

Ketua DPR RI

Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Kemudian Komisi XI DPR RI pun telah melakukan serangkaian uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada tanggal 3 Juni 2024. Dan berdasarkan rapat internal, Komisi XI DPR RI menyepakati pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan hasil Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih.

gal/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



APBN 2025 Dirancang Jaga Kesiambungan Agenda Nasional

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025. Menkeu menyebutkan APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang.

“Mengingat bahwa APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesiambungan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa (4/6) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa APBN 2025 akan menjadi fondasi



FOTO: FHN/PTD

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna.

yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Meski begitu, Menkeu menekankan dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan.

Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa,” lanjutnya.

Pada Rapat Paripurna sebelumnya yang diselenggarakan pada Selasa (28/5) lalu, seluruh Fraksi di DPR menyetujui KEM-PPKF APBN 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Sembilan Fraksi melalui juru bicara masing-masing juga telah menyampaikan masukan dan tanggapan atas KEM-PPKF APBN 2025.

“Masukan dan pandangan atas KEM PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi Pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN Tahun 2025,” kata Sri Mulyani.

uc/aha



MASIH BANYAK PEKERJAAN RUMAH DAN AGENDA PEMBANGUNAN YANG PERLU TERUS DITANGANI DAN DISELESAIKAN. CITA-CITA BESAR MEWUJUDKAN VISI INDONESIA EMAS 2045 MEMBUTUHKAN KOLABORASI YANG KUAT DARI SELURUH KOMPONEN BANGSA,

Sri Mulyani

Menteri Keuangan RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Polri Harus Siapkan Mekanisme Ketat Aturan Penyadapan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR RI akan membahas serta mengawasi mekanisme terkait penyadapan yang akan dilakukan Polri. Diketahui, aturan soal penyadapan ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Iya tentunya nanti kami akan buat mekanisme pengawasan yang lebih kuat," kata Dasco usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6). Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta Polti membuat instrumen aturan terkait penyadapan tersebut. Sehingga, proses kerjanya dapat diawasi secara menyeluruh.

Pasal yang mengatur perihal penyadapan tertuang dalam Pasal 14 huruf o. Bunyinya yakni 'melakukan



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai Parlementaria usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

IYA TENTUNYA
NANTI KAMI AKAN
BUAT MEKANISME
PENGAWASAN YANG
LEBIH KUAT.

Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan'. Pembahasan Revisi UU Polri masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden (surpres). Pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk mengirimkan surpres ke DPR.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah punya hak untuk menolak atau menerima pembahasan revisi UU tersebut.

"Surpres wajib dikirim ke DPR itu paling lama 60 hari bahwa apakah isinya setuju itu nanti di pembahasan. Siapa tahu presiden tolak semua. Kan kita nggak ngerti," ucap Supratman akhir Mei 2024 lalu. **we, hal/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Syahrul Aidi: Indonesia Harus Jadi Pelopor Perjuangan Palestina



FOTO: JKAPPOT

Ketua GKSB DPR RI - Palestina, Syahrul Aidi Maazat saat interupsi di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Palestina, Syahrul Aidi Maazat kembali menyuarakan kondisi kritis yang dihadapi Palestina saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6).

Berdasarkan data dari Grup Kerja

Sama Bilateral DPR RI itu diketahui ada lebih dari 46.500 jiwa menjadi korban, dengan 15.380 di antaranya adalah anak-anak dan 10.000 perempuan. Selain itu, 17.000 anak-anak kehilangan orang tua, 33 rumah sakit dihancurkan, dan 2 juta warga Palestina terancam kelaparan akibat blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

SAYA MENGAPRESIASI INDONESIA YANG SEMAKIN BERANI MENYUARAKAN KEPENTINGAN PALESTINA DI FORUM INTERNASIONAL, BAIK DI TINGKAT EKSEKUTIF MAUPUN LEGISLATIF.

Syahrul Aidi Maazat

Ketua GKSB DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Menurutnya, tindakan brutal dan kejam Israel yang terus melakukan aneksasi wilayah Palestina tidak dapat diterima. "Inilah kejahatan perang luar biasa di zaman modern, yang katanya menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan," tegasnya.

Karenanya, ia menyerukan agar Indonesia semakin berani memperkuat posisinya sebagai pendorong utama kemerdekaan Palestina. Ia mengusulkan agar Presiden Jokowi mengambil peran sebagai koordinator negara-negara dunia dalam perjuangan Palestina, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika.

"Saya mengapresiasi Indonesia yang semakin berani menyuarakan kepentingan Palestina di forum internasional, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif," katanya.

Saat ini, dukungan untuk Palestina juga datang dari rakyat dunia, termasuk dari kampus-kampus terkenal di Amerika dan Eropa yang secara berani menyuarakan dukungan mereka saat upacara wisuda. Kemudian, tiga negara Eropa—Spanyol, Irlandia, dan Norwegia juga baru-baru ini mengakui kemerdekaan Palestina, sehingga total menjadi 11 negara Uni Eropa yang mengakui Palestina.

"Karenanya saya berharap Indonesia bisa bertindak sebagai koordinator negara-negara di dunia dalam perjuangan Palestina untuk menciptakan kebijakan pro-rakyat, pro-kesetaraan, dan persamaan antar manusia di komunitas global untuk melindungi keberlanjutan umat manusia," tutupnya. **rnm/aha**

LISTRIK PADAM DI SUMATERA

Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik sejak hari Selasa, 4 Juni 2024 hingga Rabu 5 Juni. Pemadaman ini diduga terjadi akibat terjadinya gangguan sistem transmisi SUTT 275 KV interkoneksi Sumatera jalur Lahat - Lubuk Linggau.

PENGANGKATAN PENGGANTI

Beberapa wilayah yang terdampak oleh pemadaman listrik itu adalah :

- Sumatera Selatan
- Sumatera Barat
- Lampung
- Bangka Belitung
- Jambi
- Bengkulu

PENYEBAB BELUM JELAS

IUD PLN Sumbar masih belum menemukan penyebab utama padamnya listrik itu. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas di lapangan, PLN hanya menemukan penyebab minor seperti tower yang berdekatan dengan pohon.

"Tadi malam itu tidak bisa kita tuntaskan seluruhnya karena terhalang visibilitas akibat kondisi yang gelap," ucap Eric.

BEBERAPA WILAYAH SUDAH PULIH

PLN Persero UID di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu mengklaim listrik udah kembali ormal pada Kamis, 6 Juni 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Manajer Komunikasi dan TJSL Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Iwan Arisetyadhi.

KOMPENSASI BAGI PELANGGAN

PLN UID Sumatera Barat memastikan kompensasi berupa potongan harga hingga 10 persen bagi pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik total alias blackout.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan atas insiden mati listrik total atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera. DPR juga sudah menegur PLN

"Kami sudah minta penjelasan kepada PLN mengenai masalah ini, dan juga sudah diberi penjelasan. Kita juga sudah menegur PLN untuk tidak sampai terulang kembali kejadian ini, apalagi blackout ini tidak ditangani secara cepat

Eddy menambahkan, berdasarkan penjelasan PLN, blackout ini disebabkan adanya gangguan jaringan transmisi SUTT 275 kV jalur Lubuk Linggau-Lahat.

Dua Poin Penting Perlu Diakomodasi dalam RUU KIA



FOTO: JKAPDOT

Anggota DPR RI Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis saat interupsi pada Rapat Paripurna.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis melakukan interupsi usai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari

Pertama Kehidupan untuk disahkan menjadi Undang – Undang dalam Rapat Paripurna.

Sebelum akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna, Iskan menyampaikan catatan penting terkait RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Kehidupan (RUU KIA) yang belum

diakomodir hingga pengambilan keputusan tingkat I pada Senin lalu, (25/3).

Pertama, kami (Fraksi PKS) menekankan perlunya memasukkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam bagian konsideran awal ‘MENGINGAT’. Pasal tersebut berbunyi, ‘Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah’

“Kami menilai bahwa perlindungan terhadap hak membentuk keluarga yang sah harus menjadi dasar dalam RUU KIA. Ini penting untuk memastikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diakui dan dilindungi,” ujar Iskan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Kedua, frasa ‘yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah’ perlu ditambahkan dalam definisi keluarga pada Pasal 1 angka (5) RUU KIA. Dengan demikian, definisi tersebut akan berbunyi, ‘Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga’.

“Ini berdasarkan amanat konstitusi Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dan juga sebagai bagian dari Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” jelas Iskan.

rnm/aha

KAMI MENILAI BAHWA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK MEMBENTUK KELUARGA YANG SAH HARUS MENJADI DASAR DALAM RUU KIA. INI PENTING UNTUK MEMASTIKAN BAHWA KELUARGA SEBAGAI UNIT TERKECIL DALAM MASYARAKAT DIAKUI DAN DILINDUNGI.

Iskan Qolba Lubis

Anggota DPR RI
Komisi VIII

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Haji Tanpa Visa Resmi Dianggap Ilegal

Sebanyak 24 jemaah pemegang visa non haji asal Indonesia diamankan aparat kepolisian Kerajaan Arab Saudi. Warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap pihak keamanan Saudi karena tidak menggunakan visa haji ketika menuju Makkah, akan dideportasi. Sementara dua orang yang menjadi koordinator, menjadi tersangka dan akan diproses hukum.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan haji tanpa visa resmi dapat dianggap ilegal. Ia meminta kepada calon jemaah haji untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi.

"Visa haji resmi hanya haji reguler, haji khusus dan haji furoda selain itu dapat dianggap ilegal," pungkas Ace saat diwawancarai **Parlementaria** jelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (4/6). Menurutnya, dengan menggunakan visa non resmin dikhawatirkan akan berdampak pada



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat diwawancarai **Parlementaria** sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

penyelenggaraan haji di Indonesia.

"Kasihannya jemaah yang sudah menunggu lama untuk berangkat haji.

Ditakutkan nantinya jemaah haji tanpa visa resmi ini menggunakan hak-hak dan kewajiban untuk jemaah haji reguler," tutur Ace.

Politisi Partai Golkar ini mengimbau jemaah untuk tidak tergiur terhadap tawaran berhaji secara non prosedural dengan menggunakan visa non haji. Sebab, pemerintah Arab Saudi saat ini tengah memperketat aturan terkait visa haji.

"Otoritas Saudi sudah tegas melarang kepada calon jemaah haji yang tidak menggunakan visa resmi. Saya ingatkan kepada calon jemaah untuk tidak mudah percaya tawaran berhaji tanpa visa resmi," pungkas Ace. **tn/aha**



KASIHAN JEMAAH YANG SUDAH MENUNGGU LAMA UNTUK BERANGKAT HAJI. DITAKUTKAN NANTINYA JEMAAH HAJI TANPA VISA RESMI INI MENGGUNAKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK JEMAAH HAJI REGULER.

Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wariskan Demokrasi yang Bersih ke Generasi Muda

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk aktif mengawal persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia menekankan pentingnya mewariskan demokrasi yang sehat dan bebas dari praktik politik uang alias *money politics* kepada generasi muda, yang merupakan embrio pembangunan bangsa di masa depan.

“Mahasiswa adalah embrio pembangunan bangsa ke depan. Saatnya kita rasakan di Pemilu serentak ini, kita dapat berbagi hal-hal yang tidak patut, salah satunya adalah *money politics*. Hal ini tidak boleh diikuti di Pilkada Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ungkap Bagus Adhi Mahendra Putra usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Selatan, Palu, Selasa (4/6).

Menurut Bagus Adhi, esensi demokrasi bukan hanya tentang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana melahirkan pemimpin yang bersih,



FOTO: GYS/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Selatan, Palu, Selasa (4/6/2024).

tanpa melanggar aturan dan tanpa melakukan politik uang. Ia berharap mahasiswa bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi yang sesungguhnya.

“Demokrasi bukan hanya menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi bagaimana kita

dapat melahirkan pemimpin yang bersih tanpa melanggar aturan dan tanpa melakukan politik uang. Kita harus memberikan tontonan demokrasi yang sesungguhnya, yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, Demokrasi Pancasila,” tegasnya. **gys/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Diperlukan SDM Petugas Lapangan Pemilu yang Kuat

Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati meminta agar penyelenggara pemilu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya baik soal teknis penghitungan suara hingga penguasaan teknologi. Ia beranggapan bahwa partisipasi masyarakat bisa meningkat jika dari petugas lapangan sudah mumpuni.

"Perlu ada pelatihan kepada para *Ad Hoc* Pemilu itu tentang penguasaan materi teknis pemilu itu sendiri. Karena saya membuktikan sendiri bahwa banyak dari mereka tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan sekedar klik di *website*, itupun masih banyak yang belum bisa," jelas Haeny usai mengikuti pertemuan pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/6).



Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti pertemuan pada Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).



Selain sosialisasi mengenai dua hal tersebut, Haeny juga meminta agar nantinya petugas *Ad Hoc* Pemilu ini dibekali kemampuan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, bagaimana proses pelaporannya, dan tindakan yang akan diambil. Sehingga semakin bertambah pengalaman pemilu, bertambah pula informasi mengenai pemilu yang didapatkan masyarakat.

"Saya harap nanti tidak hanya yang dijelaskan dalam sosialisasi itu melulu tentang cara menyoblos, tetapi juga cara bagaimana nanti masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk ikut dalam pengawasan, supaya partai politik atau oknum tertentu yang melakukan pelanggaran itu bisa diminimalisir," pungkasnya.

syn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kinerja Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'



FOTO: JKA/PPT

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas KPK, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritisi tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, menurutnya ada atau tidak adanya Dewas KPK sama saja, pemberantasan korupsi masih tidak maksimal. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat, Rapat Dengar

Pendapat dengan Dewas KPK, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

"Misalnya memantau wewenang Pimpinan KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Sebab saya melihat, ketika tidak ada Dewas dulu, tugas dan wewenang KPK ini tidak jalan, tetapi setelah ada Dewas pun tambah tidak jalan. Maka pertanyaan saya kalau begitu, Dewas ini apa kerjanya?" kritik Benny.

Dalam agenda RDP ini, Komisi III meminta penjelasan Dewan Pengawas KPK terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Benny mengungkapkan, tugas Dewas KPK untuk mengawasi pelaksanaan wewenang Pimpinan KPK dalam melakukan supervisi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, Polri dan Kejaksaan.

"Pak tumpak saya ingin tahu tugas Dewas itu untuk mengawasi pelaksanaan wewenang Pimpinan KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi, penanganan pemberantasan korupsi oleh APH, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Makanya saya bilang Dewas ini seperti macan ompong," ujar Benny.

Tugas dan kewenangan Dewas KPK sejatinya sudah diatur dalam Pasal 37B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Ada sejumlah tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU KPK hasil revisi. KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **ssb/aha**

PAK TUMPAK SAYA INGIN TAHU TUGAS DEWAS ITU UNTUK MENGAWASI PELAKSANAAN WEWENANG PIMPINAN KPK UNTUK MELAKUKAN SUPERVISI DAN KOORDINASI, PENANGANAN PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH APH, DALAM HAL INI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN. MAKANYA SAYA BILANG DEWAS INI SEPERTI MACAN OMPONG.

Benny K Harman

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Libatkan Tokoh Adat dalam Pembangunan Papua

Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk kedepan lebih melibatkan peran tokoh dan masyarakat adat dalam melakukan berbagai program pembangunan serta pelayanan di tanah Papua.

"Sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan perlu juga mengacu pada masyarakat adat. Karena dengan adanya lembaga masyarakat yang terbentuk ini mereka terlindungi, terlayani dengan baik. Jadi dalam penyelenggaraan program-program pembangunan dari pusat perlu juga sentuhan kepada mereka sehingga peran mereka itu dikuatkan," kata Willem dalam Raker Komisi V di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini bahkan menerangkan para tokoh adat mempunyai peran yang sangat penting di Papua, dimulai dari



Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik saat mengikuti Raker Komisi V di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

melerai konflik hingga pengambilan keputusan-keputusan.

"Mereka punya peran sangat

penting, setiap ada konflik peran mereka sangat penting. Di sana tidak perlu tentara, tidak perlu polisi. Mereka hati-hati sudah damai. Membuka lahan besar, itu butuh keputusan, keadilan daripada tokoh masyarakat adat setempat," ujar Legislator Papua tersebut.

Sementara itu, dalam rapat ini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berkomitmen mengupayakan serapan anggaran kementerian tersebut pada 2024, lebih baik daripada tahun 2023 yang mencapai 98,13 persen. Menurut Gus Halim, sapaan akrabnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi anggaran Kemendes PDTT di 2024 mengalami peningkatan dari 26,82 persen menjadi 30,69 persen.

we/aha



MEREKA PUNYA PERAN SANGAT PENTING, SETIAP ADA KONFLIK PERAN MEREKA SANGAT PENTING. DI SANA TIDAK PERLU TENTARA, TIDAK PERLU POLISI. MEREKA HATI-HATI SUDAH DAMAI. MEMBUKA LAHAN BESAR, ITU BUTUH KEPUTUSAN, KEADILAN DARIPADA TOKOH MASYARAKAT ADAT SETEMPAT.

Willem Wandik

Anggota Komisi V DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Tingginya Biaya Angkut Logistik Jadi Sorotan



FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti pergerakan barang atau logistik di Indonesia masih

didominasi oleh angkutan darat, yaitu sebesar 91 persen. Menurutnya, beban pergerakan logistik di Indonesia haruslah dibagi, sehingga bisa menekan biaya logistik yang masih cukup tinggi.



PEMALSUAN ENAM PELAT DPR RI INI SEKALIGUS KAN LUAR BIASA. JADI, HARAPAN KAMI KEPADA KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA SEHINGGA KITA BISA MENGETAHUI TUJUAN MOTIF TERSANGKA TERSEBUT.

Imron Amin

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI

“Semangat kita adalah bagaimana kita menekan biaya logistik kita yang cukup tinggi. Rumusnya ketika kita masih menggunakan angkutan darat, pasti biaya logistik kita besar,” kata Syahrul dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

Untuk itu, Syahrul mengusulkan untuk mengoptimalkan fungsi kereta dalam upaya distribusi logistik atau angkut barang. Menurutnya, Indonesia masih sangat minim memanfaatkan fungsi kereta sebagai media angkut dibanding negara-negara lain di dunia.

“Dalam catatan kami, kereta angkutan itu untuk logistik (di Indonesia) masih 0,7 persen. Sementara di Amerika itu, kereta angkutan barang di Amerika sebesar 28 persen. Di Eropa 18 persen, artinya kita belum memaksimalkan fungsi kereta api ini sebagai angkutan untuk bagaimana memurahkan biaya logistik kita,” terang Politisi Fraksi PKS ini.

Begitupun dengan transportasi laut, Legislator Dapil Riau II ini menilai pemerintah masih belum memaksimalkan transportasi laut untuk menekan biaya logistik. “Bagaimana kita menggunakan, kita memfungsikan pelabuhan-pelabuhan kita untuk menekan biaya logistik kita. Apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu tol laut itu belum berfungsi dengan maksimal,” sambungnya.

we/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kemenag Diminta Tambah Insentif Penyuluh Agama

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menilai insentif bagi penyuluh agama dan guru-guru agama yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) masih kecil. Untuk itu, ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk menganggarkan tambahan insentif untuk penyuluh agama di daerah 3T

"Mohon mungkin ini perlu penambahan. Guru-guru, dai, penyuluh agama, perlu untuk tambahan insentif karena itu daerah rawan," kata Achmad dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala BNPB, di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Menurut Legislator Dapil Riau I ini, sudah sepatutnya para penyuluh agama, guru-guru agama, dan pendakwah, tersebut mendapatkan insentif sebagai imbalan jasa terhadap kerelaan mereka mengajar di daerah



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala BNPB, di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

3T yang dihadapkan pada beragam keterbatasan.

Achmad pun mengatakan hal tersebut merupakan salah satu keluhan dari para penyuluh agama, guru-guru agama, dan pendakwah,

yang ditemui oleh Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja mereka. "Itu keluhan waktu kami turun ke lapangan, seperti Riau," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan Kemenag mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17.542.505.686 untuk tahun anggaran 2025 setelah sempat mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp78.021.939.759.000.

Lebih lanjut dia menyampaikan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan sejumlah hal, antara lain penambahan alokasi untuk 1.250.000 keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah dalam upaya menurunkan angka *stunting*, peningkatan layanan haji dalam negeri, dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. **tn/aha**



SUDAH SEPATUTNYA PARA PENYULUH AGAMA, GURU-GURU AGAMA, DAN PENDAKWAH, TERSEBUT MENDAPATKAN INSENTIF SEBAGAI IMBALAN JASA TERHADAP KERELAAN MEREKA MENGAJAR DI DAERAH 3T YANG DIHADAPKAN PADA BERAGAM KETERBATASAN.



Perhatikan Kesehatan Calon Jemaah Haji Lansia



FOTO: PUN/PHOTO

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay beserta tim mengecek aspek kesehatan calon jemaah haji di Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6/2024).

Jelang keberangkatan haji, aspek kesehatan calon jemaah menjadi faktor terpenting. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi

IX yang membidangi sektor kesehatan menggelar kunjungan kerja spesifik ke Embarkasi Palembang, Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/6).



JADI INI EMBARKASI, INI SEBETULNYA EMBARKASI YANG SAYA KIRA PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN. PERHATIAN YANG PERTAMA, INI EMBARKASI ADALAH SALAH SATU EMBARKASI DI INDONESIA YANG TINGKAT LANSIANYA TINGGI. JADI TADI BERDASARKAN LAPORAN ITU SAMPAI 80 KOMA SEKIAN PERSEN. DARI TOTAL JEMAAH YANG AKAN BERANGKAT ITU 80,1 PERSENNYA.

Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dipimpin langsung Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay beserta tim didampingi perwakilan Kemenkes RI dan Kakanwil Kemenag Sumatera Selatan, segenap wakil rakyat meninjau langsung fasilitas hingga ruang Poliklinik di embarkasi tersebut. Dalam rangka memastikan calon jemaah haji khususnya lansia benar-benar terjamin kesehatannya sebelum berangkat ke Mekkah, Arab Saudi.

“Jadi ini embarkasi, ini sebetulnya embarkasi yang saya kira perlu mendapatkan perhatian. Perhatian yang pertama, ini embarkasi adalah salah satu embarkasi di Indonesia yang tingkat lansianya tinggi. Jadi tadi berdasarkan laporan itu sampai 80 koma sekian persen. Dari total jemaah yang akan berangkat itu 80,1 persennya,” ujar Saleh kepada **Parlementaria** usai peninjauan.

Oleh karena itu, tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini, maka tentu saja hal-hal mengenai jaminan aspek kesehatan calon jemaah haji yang lansia menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dengan demikian, tandas Saleh, segenap kaum lansia tersebut tidak mendapatkan kesulitan untuk diberangkatkan.

Namun demikian, pihaknya tetap mengapresiasi Pemerintah bersama pihak embarkasi dalam menerapkan ‘triple check’ dalam tahapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji sebelum diberangkatkan. Sebelum diperiksa final di embarkasi, kini para calon jemaah haji terlebih dulu medical *check up* dari Puskesmas dan rumah sakit.

pun/aha

Penyaringan Kesehatan Calon Jemaah Haji di Tanah Air Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi pelayanan kesehatan haji yang diberikan kepada para Jemaah Haji di Asrama Donohudan, Jawa Tengah. Meski demikian ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan dijalankan.

"Kedatangan kami ke Asrama Haji Donohudan ini dalam rangka pengawasan pelayanan kesehatan ibadah haji. Secara keseluruhan pelayanan kesehatan sudah dilakukan, termasuk tiga kali proses *screening* (penyaringan). Kami mengapresiasi hal tersebut," ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Wakil Ketua PPIH (Panitia Perjalanan Ibadah Haji) Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/6).

Dilanjutkan Kurniasih, meski telah dilakukan tiga kali penyaringan kepada calon jemaah haji dari Jawa Tengah dan Yogyakarta ini, namun ditemukan banyak calon jemaah haji



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat mengecek aspek kesehatan calon jemaah haji di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/6/2024).

yang sakit, bahkan meninggal di tanah suci. Kebanyakan dari calon jemaah haji yang meninggal itu merupakan lansia (lanjut usia) dengan penyebab

berbagai penyakit, diantaranya jantung dan dimensia.

Menurutnya, penyakit tersebut sejatinya merupakan penyakit yang bisa terdeteksi sejak lama, alias bukan tiba-tiba ada. Oleh karenanya timbul pertanyaan bagaimana proses penyaringan yang dilakukan di tanah air.

"Karena itu saya berharap dilakukan peningkatan dalam proses *screening* di tanah air sebagai sebuah langkah promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sehingga akan mengurangi angka calon jemaah haji yang meninggal baik di asrama haji tanah air, maupun yang meninggal di tanah suci," pinta Politisi Fraksi PKS ini. **ayu/aha**



KEDATANGAN KAMI KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN INI DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN IBADAH HAJI. SECARA KESELURUHAN PELAYANAN KESEHATAN SUDAH DILAKUKAN, TERMASUK TIGA KALI PROSES *SCREENING* (PENYARINGAN). KAMI MENGAPRESIASI HAL TERSEBUT.

Kurniasih Mufidayati

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Apresiasi Inovasi OSS Kesehatan di Embarkasi Haji

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengapresiasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Haji Makassar atas inovasi layanan *One Stop Service* (OSS)-nya. Khususnya, dalam bidang kesehatan bagi jemaah di Asrama Haji Sudiang Makassar

“Kami sangat mengapresiasi dengan inovasi yang dijalankan oleh teman-teman yang ada di embarkasi Makassar, ini justru mempercepat durasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang ada di sini,” terang Putih saat ditemui usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/6).

Layanan OSS yang mulai dilakukan Embarkasi Haji Makassar pada tahun 2024 ini meliputi pemeriksaan kesehatan jemaah dan Wanita Usia Subur (WUS) yang dilaksanakan di satu tempat serta layanan jemput bola



FOTO: RR/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/6/2024).

bagi jemaah lansia. Selain itu juga terdapat layanan pembagian lembar

akomodasi, dan penyerahan *living cost* bagi jemaah sehingga sangat efisien bagi jemaah.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa durasi yang singkat dalam pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji di Embarkasi Haji Makassar sangat penting. Menurutnya hal tersebut dapat menghemat waktu jemaah haji, sehingga memberikan kesempatan yang lebih panjang bagi mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan diri.

“Durasi ini menjadi penting, karena beberapa jemaah haji kita yang berangkat dari Embarkasi Makassar ini kan datang dari beberapa wilayah yang telah melalui perjalanan yang cukup jauh untuk datang kesini, sehingga dengan durasi yang lebih singkat ini dapat memberikan waktu kepada jemaah untuk istirahat lebih panjang,” ungkapnya. [rr/aha](#)



KAMI SANGAT MENGAPRESIASI DENGAN INOVASI YANG DIJALANKAN OLEH TEMAN-TEMAN YANG ADA DI EMBARKASI MAKASSAR, INI JUSTRU MEMPERCEPAT DURASI PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI YANG ADA DI SINI.



Putih Sari

Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Sekjen DPR RI
Indra Iskandar saat
menghadiri acara
Sosialisasi Magang
Merdeka di Wisma
Griya Sabha DPR RI,
Bogor, Jawa Barat
(6/6/2024).**

FOTO: FHN/PDT

